



JEJAK REFORMASI PERTAHANAN-KEAMANAN: PEMISAHAN POLRI DAN PENGHAPUSAN DWI FUNGSI ABRI DALAM TRANSISI DEMOKRASI ERA GUS DUR

¹Afrizal Haris Purnomo

¹ Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Semarang
afrizalharis419@gmail.com

*Received 1 Maret 2023; Revised: 3 Maret 2023; Accepted: 15 April 2023; Published: 20 April 2023; Available online: April 2023
(sesuaikan dengan Volume penerbitan)*

ABSTRAK

Jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 menandai awal era reformasi yang membawa perubahan besar dalam sistem politik dan keamanan Indonesia. Salah satu agenda utama reformasi adalah transformasi sektor pertahanan dan keamanan melalui pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta penghapusan konsep Dwi Fungsi ABRI yang telah mengakar selama puluhan tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses, kebijakan, tantangan, dan dampak reformasi sektor keamanan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999–2001). Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka berpadu analisis historis, penelitian ini menemukan bahwa reformasi Gus Dur didorong oleh komitmen terhadap supremasi sipil dan profesionalisme militer. Kebijakan pemisahan Polri dan TNI serta penghapusan Dwi Fungsi ABRI menjadi langkah penting memperkuat kontrol sipil atas militer. Meskipun menghadapi hambatan struktural, resistensi internal, dan kondisi keamanan yang tidak stabil, reformasi pada masa Gus Dur tetap menjadi fondasi utama bagi konsolidasi demokrasi dan profesionalisasi sektor pertahanan-keamanan Indonesia.

Kata Kunci: Reformasi Sektor Keamanan, Dwi Fungsi ABRI, Pemisahan TNI–Polri, Abdurrahman Wahid, Supremasi Sipil

ABSTRACT

The fall of the New Order regime in 1998 marked the beginning of the Reform Era, bringing major transformations to Indonesia's political and security systems. One of the main reform agendas was the transformation of the defense and security sector through the separation of the Indonesian National Police (Polri) from the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the abolition of the *Dwi Fungsi ABRI* (dual

function) doctrine that had been deeply entrenched for decades. This study aims to analyze the process, policies, challenges, and impacts of security sector reform during the presidency of Abdurrahman Wahid (1999–2001). Using a qualitative approach and library research method combined with historical analysis, the study finds that Wahid's reform agenda was driven by a strong commitment to civilian supremacy and military professionalism. The separation of Polri from TNI and the abolition of *Dwi Fungsi ABRI* were crucial steps to strengthen civilian control over the military. Despite structural and cultural obstacles, Gus Dur's reforms laid a vital foundation for Indonesia's democratic consolidation and defense–security professionalism.

Key Word: Security Sector Reform, *Dwi Fungsi ABRI*, TNI–Polri Separation, Abdurrahman Wahid, Civilian Supremacy

PENDAHULUAN

Jatuhnya rezim Orde Baru pada Mei tahun 1998 memulai babak baru dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Reformasi bergulir tidak hanya menuntut perubahan kepemimpinan nasional, tetapi juga transformasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, termasuk sektor pertahanan dan keamanan (Crouch, 2007). Salah satu legacy yang paling kontroversial dari era Soeharto adalah konsep *Dwi Fungsi ABRI* (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang memposisikan kekuatan militer sebagai aktor politik dan social di pemerintahan (Sukma, 2003). *Dwi Fungsi ABRI* dikembangkan sejak tahun 1950-an, yang memberikan legitimasi bagi keterlibatan militer dalam politik sipil (Honna, 2003). Dalam penerapannya, konsep ini menempatkan perwira militer di berbagai posisi strategis pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah. Polisi, yang pada

masa itu berada dibawah komando ABRI, juga terlibat dalam fungsi keamanan yang sering kali represif terhadap gerakan oposisi dan yang kritis terhadap pemerintahan.

Pada Oktober 1999, Ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) naik sebagai Presiden Indonesia keempat, salah satu agenda prioritasnya adalah melakukan reformasi pada sektor pertahanan dan keamanan. Gus Dur yang dikenal sebagai tokoh demokrat dan pluralis, memahami bahwa konsolidasi demokrasi Indonesia tidak akan berhasil tanpa mereformasi institusi militer dan memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri (Mietzner, 2009). Gus Dur memiliki visi untuk mengembalikan militer ke barak dan membangun kepolisian yang profesional serta berorientasi pada pelayanan Masyarakat (Rinakit, 2005). Kebijakan ini diambil untuk memisahkan Polri dan TNI secara institusi dan

menghapus dwi fungsi ABRI yang sudah mengakar selama puluhan tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses reformasi pertahanan-keamanan pada era Gus Dur, dengan fokus pada pemisahan Polri dari TNI dan penghapusan dwi fungsi ABRI. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Bagaimana proses pemisahan Polri dari ABRI dilaksanakan pada era Gus Dur? (2) Bagaimana kebijakan penghapusan dwi fungsi ABRI diterapkan? (3) Apa tantangan dan hambatan dalam proses reformasi tersebut? (4) Bagaimana dampak reformasi tersebut terhadap konsolidasi demokrasi Indonesia?

KAJIAN PUSTAKA

Honna (2003) menganalisis jika dwi fungsi ABRI bukan hanya doktrin ideologis, tetapi juga mekanisme kekuasaan yang sistematis. Militer membangun jaringan kekuasaan melalui tiga pilar: struktur teritorial (kodam, korem, kodim dan koramil) untuk representasi politik di parlemen, dan penempatan perwira aktif serta purnawirawan di posisi kunci dalam pemerintahan. Sistem ini menciptakan ketergantungan rezim politik terhadap militer, sekaligus memberikan akses ekonomi-politik yang luas kepada

institusi dan individu dalam tubuh TNI.

Selama menjadi bagian dari ABRI, Polri mengalami "militarisasi" dalam berbagai aspek. Seperti struktur organisasi, pendidikan, dan budaya organisasi Polri sangat dipengaruhi oleh doktrin dan praktik yang berbau militer (Siregar, 2009). Fungsi kepolisian sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat melemah, dan lebih diorientasikan untuk fungsi pengamanan politik dan pengendalian sosial untuk kepentingan rezim.

Setelah melalui perjalanan yang Panjang, diwujudkanlah Reformasi sektor keamanan (Security Sector Reform/SSR) merupakan konsep yang berkembang pada akhir 1990-an sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mentransformasi institusi keamanan negara-negara yang mengalami transisi dari otoritarianisme ke demokrasi atau dari konflik ke perdamaian (Ball, 2010).

Menurut Cawthra dan Luckham (2003), SSR mencakup transformasi fundamental dalam institusi keamanan (militer, polisi, intelijen) agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien di bawah control sipil yang demokratis, tunduk pada supremasi hukum, dan menghormati hak asasi

manusia. Jadi reformasi ini tidak hanya menyangkut aspek structural dan organisasi, tetapi juga transformasi untuk nilai-nilai di dalam institusi keamanan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi Pustaka (library research) yang dikombinasikan dengan pendekatan historis analitis. Metode studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses memahami, menganalisis, dan mengkaji teori-teori serta informasi yang terdapat dalam berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian (Marbun, 2020). Sumber data dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan reformasi sektor keamanan seperti ketetapan MPR dan Undang-Undang Kepolisian, literatur akademik berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang pemisahan Polri-TNI dan penghapusan dwi fungsi ABRI. Periodisasi penelitian difokuskan pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid (Oktober 1999-Juli 2001) sebagai fase krusial dalam reformasi sektor keamanan Indonesia. Periode ini dipilih karena pada masa inilah kebijakan-kebijakan fundamental seperti pemisahan Polri dari TNI dan penghapusan dwi fungsi ABRI secara formal

diimplementasikan serta mendapat momentum politik yang signifikan. Meskipun demikian, pembahasan juga mencakup konteks sebelum dan sesudah periode tersebut untuk memberikan pemahaman yang luas tentang perubahan dalam proses reformasi.

PEMBAHASAN

Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden keempat Republik Indonesia pada 20 Oktober 1999 melalui pemilihan di sidang umum MPR. Pemilihannya menandai kemenangan politik sipil atas militer dalam konteks transisi demokrasi Indonesia. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang memiliki latar belakang militer atau hubungan erat dengan militer, Gus Dur adalah tokoh sipil dengan basis dukungan kuat dari organisasi masyarakat sipil, khususnya Nahdlatul Ulama (NU) (Barton, 2002). Ia dikenal sebagai anggota keluarga terpandang karena kakeknya, K.H. Hasyim Asy'ari, merupakan pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Sementara itu, ayahnya pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 1949. Abdurrahman Wahid sendiri menjabat sebagai Ketua Umum NU dari tahun 1984 hingga 1999. Karier politiknya dimulai saat menjadi anggota MPR dari Partai Golkar, yang

kemudian berlanjut hingga ia terpilih sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang kerap kontroversial. Gus Dur sejak awal memang sudah menyatakan komitmen kuat untuk melakukan reformasi total terhadap militer dan polisi. Dalam berbagai pidato dan pernyataan publiknya, ia menegaskan bahwa militer harus kembali ke fungsi pertahanan dan keluar dari politik praktis. Ia juga menekankan pentingnya membangun kepolisian yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik, bukan alar represif penguasa. Dalam upaya memperkuat kontrol sipil terhadap militer, Presiden Abdurrahman Wahid mengambil langkah dengan mengganti struktur kepemimpinan di tubuh TNI. Ia menunjuk Laksamana Widodo sebagai Panglima TNI, keputusan yang menuai kontroversi karena dianggap menyimpang dari tradisi sebelumnya, di mana jabatan tersebut selalu dipegang oleh perwira dari Angkatan Darat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membangun tradisi baru dalam penunjukan pimpinan TNI dan mengakhiri dominasi Angkatan Darat yang sejak masa proklamasi hingga era Orde Baru selalu menduduki posisi tertinggi,

sehingga menimbulkan kesan adanya hegemoni dalam tubuh militer (Kontras, 2005).

Secara prinsip, gagasan mengenai Dwi Fungsi ABRI pada awalnya dianggap sebagai konsep yang wajar dan relevan. Konsep ini menekankan pengabdian total prajurit terhadap bangsa dan negara, terutama dalam menjaga pertahanan serta keamanan nasional. Dalam praktiknya, penerapan Dwi Fungsi ABRI pada bidang pertahanan dan keamanan seharusnya diwujudkan melalui perumusan kebijakan nasional dan kontribusi pemikiran strategis, bukan melalui keterlibatan langsung dalam ranah politik maupun pemerintahan sipil (Sukarno Putra & Umamah, 2019). Dalam praktiknya, penerapan konsep Dwi Fungsi ABRI sering kali menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan melampaui batas dari maksud awalnya. Penyimpangan tersebut tampak jelas melalui keterlibatan aktif para perwira militer dalam bidang sosial dan politik. Melalui konsep kekaryaan, banyak perwira militer menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan daerah, seperti kepala desa, camat, bupati atau wali kota, gubernur, bahkan hingga jabatan menteri. Selain itu, sejumlah posisi birokrasi yang seharusnya diisi oleh kalangan

sipil seperti kepala dinas, kepala kantor departemen, inspektur jenderal, direktur jenderal, hingga sekretaris jenderal juga banyak diduduki oleh pejabat militer.

Proses Pemisahan Polri dari TNI

Pemisahan Polri dari TNI merupakan salah satu agenda reformasi yang paling konkret dan simbolis. Proses ini sebenarnya telah dimulai pada masa kepresidenan B.J. Habibie dengan dikeluarkannya ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 1 April 1999, secara resmi Polri dipisahkan dari TNI dan berada langsung di bawah Presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan posisi Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat Indonesia (Siregar, 2009). Namun, proses transformasi ini

menghadapi berbagai hambatan. Kultur organisasi yang sudah terbentuk selama puluhan tahun dalam struktur ABRI tidak mudah diubah dalam waktu singkat. Banyak personel Polri, terutama yang senior masih memiliki mindset dan gaya kepemimpinan militeristik.

Penghapusan Dwi Fungsi ABRI

Penghapusan dwi fungsi ABRI merupakan agenda reformasi yang lebih kompleks dan politis dibanding pemisahan Polri dari TNI. Dwi fungsi telah menjadi identitas dan sumber legitimasi TNI selama puluhan tahun, sehingga penghapusannya mengancam posisi politik dan ekonomi institusi militer (Honra, 2003). Landasan hukum penghapusan dwi fungsi dimulai dengan ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 yang menegaskan bahwa TNI harus keluar dari politik praktis dan fokus pada fungsi pertahanan negara. Ketetapan ini menyatakan bahwa TNI tidak lagi memiliki perwakilan di DPR/MPR, dan anggota TNI yang ingin terlibat dalam politik harus mundur dari dinas aktif terlebih dahulu (Sukma, 2003). Adanya reformasi doktrin militer dari dwi fungsi menjadikan paradigma baru yang menekankan profesionalisme dan peran TNI yang terbatas pada pertahanan negara. TNI mulai

mengembangkan konsep “TNI yang profesional” yang berfokus pada kesiapan tempur, modernisasi alutsista, dan penguasaan teknologi militer terkini, alih-alih terlibat dalam politik dan bisnis. Warisan struktural dan kultural dwi fungsi yang sangat mengakar, hingga struktur teritorial TNI hingga ke level desa, jaringan alumni militer di birokrasi dan dunia usaha, serta kultur paternalistik serta superioritas militer atas sipil tidak bisa dihapus hanya dengan mengubah regulasi formal. Transformasi menyeluruh memerlukan perubahan generasi dan reformasi kultural yang bisa memakan waktu hingga puluhan tahun.

Kontrol Sipil atas Militer serta Tantangan yang dihadapi

Salah satu aspek penting dari reformasi sektor keamanan adalah penguatan kontrol sipil demokratis atas militer. Gus Dur berupaya menegaskan otoritas presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata dan membangun mekanisme kontrol sipil yang efektif (Barton, 2002). Salah satu aspek penting dari reformasi sektor keamanan adalah penguatan kontrol sipil demokratis atas militer. Gus Dur berupaya untuk menegaskan otoritas presiden sebagai

panglima tertinggi angkatan bersenjata dan membangun mekanisme kontrol sipil yang efektif. Kontrol sipil terhadap militer menjadi syarat fundamental dalam upaya demokratisasi serta terwujudnya profesionalisme militer dan supremasi sipil (Basuki, 2014). Salah satu episode yang paling kontroversial adalah pemberhentian Jenderal Wiranto sebagai Menkopolkam dan penggantinya dengan Laksamana Widodo AS. Wiranto, yang merupakan tokoh militer paling berpengaruh pada awal reformasi, dipandang oleh kalangan reformis sebagai representasi dari kepentingan status quo militer. Pemberhentian Wiranto menandakan tekad Gus Dur untuk tidak berkompromi dengan kekuatan lama, namun juga menimbulkan reaksi keras dari sebagian elite militer yang merasa kepentingan mereka terancam. Kondisi keamanan yang tidak stabil juga menjadi hambatan bagi reformasi. Pada masa Gus Dur, Indonesia menghadapi berbagai ancaman keamanan seperti konflik Aceh, konflik Maluku, separatisme Papua, dan ancaman terorisme. Dalam situasi seperti ini, tuntutan agar TNI fokus pada fungsi pertahanan menjadi sulit diimplementasikan, karena TNI masih diperlukan untuk

mengatasi konflik-konflik internal (Sukma, 2003). Keterbatasan kapasitas Polri juga menjadi masalah. Setelah dipisahkan dari TNI, Polri diharapkan untuk mengambil alih sepenuhnya fungsi keamanan dalam negeri. Namun, Polri belum memiliki kapasitas memadai dalam hal personel, peralatan, dan profesionalisme untuk menangani berbagai ancaman keamanan yang kompleks. Akibatnya, TNI masih sering diminta untuk terlibat dalam operasi-operasi keamanan internal, yang pada gilirannya menghambat proses reformasi.

Dampak terhadap Konsolidasi Demokrasi

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, reformasi sektor keamanan pada era Gus Dur memberikan dampak signifikan terhadap proses konsolidasi demokrasi Indonesia. Pemisahan Polri dari TNI dan penghapusan dwi fungsi ABRI merupakan langkah fundamental untuk mengurangi dominasi militer dalam politik dan membangun sistem politik yang lebih demokratis (Mietzner, 2009). Pertama, reformasi ini mengubah keseimbangan kekuatan antara kekuatan sipil dan militer. Militer tidak lagi secara otomatis memiliki akses ke lembaga-lembaga politik dan posisi-posisi kunci pemerintahan. Ini membuka

ruang bagi kekuatan-kekuatan sipil untuk berkembang dan berperan lebih besar dalam politik. Kedua, reformasi ini mengubah diskursus tentang peran militer dalam masyarakat. Jika pada era Orde Baru dwi fungsi ABRI merupakan doktrin yang tidak bisa dipertanyakan, maka pasca reformasi muncul wacana publik yang kritis terhadap militer dan tuntutan agar militer tunduk pada otoritas sipil demokratis. Media massa, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi memainkan peran penting dalam mengawasi sektor keamanan dan mengadvokasi reformasi (Sukma, 2003). Ketiga, reformasi ini membuka jalan bagi profesionalisasi institusi keamanan. Meskipun prosesnya lambat dan masih menghadapi banyak hambatan, baik TNI maupun Polri mulai mengembangkan orientasi yang lebih profesional, fokus pada tugas pokok masing-masing, dan berupaya meningkatkan kapasitas teknis dan operasional (Honra, 2003). Namun, dampak reformasi juga memiliki keterbatasan. Penghapusan dwi fungsi ABRI secara formal tidak serta merta menghilangkan pengaruh informal militer dalam politik. Elite militer masih memiliki jaringan kuat di birokrasi, dunia usaha, dan partai politik. Mereka juga masih memiliki kemampuan

untuk mempengaruhi proses politik melalui berbagai cara informal. Selain itu, penarikan militer dari politik praktis tidak diimbangi dengan pembangunan institusi sipil yang kuat. Akibatnya, muncul berbagai masalah tata kelola pemerintahan seperti korupsi, inefisiensi birokrasi, dan lemahnya penegakan hukum. Beberapa kalangan bahkan mulai bernostalgia terhadap "stabilitas" era Orde Baru dan mempertanyakan manfaat reformasi

PENUTUP

Reformasi sektor keamanan pada era Gus Dur, khususnya pemisahan Polri dari TNI dan penghapusan dwi fungsi ABRI, merupakan agenda yang sangat strategis dalam proses transisi demokrasi Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diambil pada periode 1999-2001 meletakkan fondasi bagi transformasi fundamental institusi keamanan dari orientasi politik-bisnis menjadi orientasi profesional. Pemisahan Polri dari TNI mengakhiri lebih dari tiga dekade penggabungan yang telah membawa dampak negatif bagi profesionalisme kepolisian. Polri kemudian berupaya membangun identitas baru sebagai institusi sipil yang berorientasi pada pelayanan publik dan penegakan hukum. Sementara itu,

penghapusan dwi fungsi ABRI menandai berakhirnya legitimasi formal bagi keterlibatan militer dalam politik dan membuka jalan bagi supremasi sipil. Namun, implementasi reformasi menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Resistensi dari dalam institusi militer, keterbatasan kapasitas institusional, kondisi keamanan yang tidak stabil, dan kurangnya dukungan politik yang konsisten menghambat proses transformasi. Reformasi yang diinisiasi Gus Dur bersifat "unfinished" dan memerlukan kontinuitas kebijakan dalam jangka panjang. Dampak reformasi terhadap konsolidasi demokrasi bersifat ambivalen. Di satu sisi, reformasi berhasil mengubah lanskap politik dengan mengurangi dominasi militer dan membuka ruang bagi kekuatan sipil. Di sisi lain, warisan otoritarianisme militer masih kuat dan pengaruh informal militer dalam politik belum sepenuhnya hilang. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan adalah proses jangka panjang yang memerlukan komitmen politik yang konsisten, pembangunan kapasitas institusional, dan transformasi kultural. Kepemimpinan Gus Dur memberikan momentum penting bagi reformasi ini, meskipun pemerintahannya yang singkat tidak cukup untuk menyelesaikan agenda transformasi yang

kompleks. Ke depan, konsolidasi reformasi sektor keamanan memerlukan beberapa hal: (1) penguatan kontrol sipil demokratis melalui pembangunan kapasitas lembaga-lembaga kontrol sipil seperti Kementerian Pertahanan, DPR, dan lembaga pengawasan; (2) profesionalisasi berkelanjutan TNI dan Polri melalui reformasi pendidikan, pelatihan, dan sistem karir; (3) penyelesaian masalah ekonomi militer dengan menyediakan anggaran negara yang memadai; (4) transformasi kultural untuk mengubah mindset dari "tentara politik" menjadi "tentara profesional"; dan (5) penguatan masyarakat sipil untuk mengawasi sektor keamanan.

Reformasi era Gus Dur, dengan segala keterbatasannya, telah membuka jalan bagi Indonesia untuk keluar dari bayang-bayang otoritarianisme militer dan membangun sistem politik yang lebih demokratis. Warisan kebijakan reformasi ini menjadi fondasi bagi perkembangan demokrasi Indonesia pada dua dekade berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ball, N. (2010). *The evolution of the security sector reform agenda*. In *The future of security sector reform* (pp. 29–45).
- Barton, G. (2002). *Abdurrahman Wahid: Muslim democrat, Indonesian president*. University of Hawaii Press.
- Bhakti, I. N., Sambuaga, T. L., Widjojo, A., & Araf, A. (Eds.). (2008). *TNI–Polri di masa perubahan politik* (Cet. ke-2). Bandung: Program Magister Studi Pertahanan Institut Teknologi Bandung dan Imparsial.
- Cawthra, G., & Luckham, R. (Eds.). (2003). *Governing insecurity: Democratic control of military and security establishments in transitional democracies* (Vol. 1). Zed Books.
- Crouch, H. A. (2007). *The army and politics in Indonesia*. Equinox Publishing.
- Gunawan, A. B. (2017). Kontrol sipil atas militer dan kebijakan pertahanan di Indonesia pasca Orde Baru. *Jurnal Politik*, 2(2), 198–223.
- Hidayat, A. (2016). Reformasi sektor keamanan di Indonesia: Antara harapan dan kenyataan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(3), 204–219.
- Honna, J. (2003). *Military politics and democratization in Indonesia*. RoutledgeCurzon.
- Huda, N. (2011). *Reformasi TNI: Pola profesionalitas dan refungsionalisasi militer*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Kontras. (2005). *Politik militer dalam transisi demokrasi Indonesia: Catatan KontraS pasca perubahan rezim 1998*. Jakarta: KontraS.
- Marbun, P. (2020). Strategi dan model pembinaan rohani untuk pendewasaan iman jemaat. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 2(2), 151-169.
- Mietzner, M. (2009). *Military politics, Islam, and the state in Indonesia: From turbulent transition to democratic consolidation*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Putra, A. S., Umamah, N., & Sumarno. (2019, February). The president's political policy Abdurrahman Wahid about Indonesian military years 1999-2001. *Jurnal Historica*, 3(1), 115-124.
- Rachmawati, I. K. (2017). Reformasi sektor keamanan dan supremasi sipil di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(2), 293-314. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Rinakit, S. (2005). *The Indonesian military after the new order* (No. 2). NIAS Press.
- Siregar, S. N. (2016). Evaluasi sepuluh tahun reformasi Polri. *Jurnal Penelitian Politik*, 5(1), 47-58.
- Sukma, R. (2003). *Security sector reform in Indonesia: The military and the police*. The Hague: Netherlands Institute of International Relations.